

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



**KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2019**

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2019 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut sesuai dengan rencana kerja tahun 2019 Kecamatan Bunguran Timur Laut telah menetapkan 5 (lima) Program sarasan strategis yang diwujudkan dalam 20 (dua puluh) Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2019, ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan mencapai 95,54 % belum maksimalnya tingkat capaian tersebut dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau penghematan dan penyesuaian kondisi kegiatan dilapangan.

Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki peluang sehingga berupaya meningkatkan kinerjanya yang maksimal. Hasil capaian kinerja diatas, naik yang telah mencapai 100% maupun yang belum mencapai 100%, lebih memotivasi Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki 5 (lima) Program sarasan strategis yang diwujudkan dalam 20 (dua puluh) Kegiatan dianggarkan dari Alokasi Dana Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.661.373.161,00**. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 1.600.694.295,87** atau **96,35 %**, dari anggaran pembiayaan tersebut maka perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut di ukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Bunguran Timur Laut yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas izinnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan upaya pedoman perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna selama tahun anggaran 2019.

Dalam penyusunan LKj ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan LKj sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bunguran Timur Laut, 9 Januari 2020

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT



ISPARTA CHAIRAIYADI, S.STP
NIP. 19840512 200312 1 002

DAFTAR ISI

ISI	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.. ..	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur Laut.....	3
1.5 Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019	10
2.1.1. Visi dan Misi.....	10
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.3 Indikator Kinerja Utama.....	12
2.2 Rencana Kinerja Bunguran Timur Laut Tahun 2019.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja.....	18
3.2 Analisa Kinerja.....	20
3.3 Analisis Keuangan.....	21
BAB IV PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Letak Geografis dan keadaan Umum.....	5
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk.....	6
Tabel 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	7
Tabel 1.4. Data PNS dan PTT Kecamatan Bunguran Timur Laut.....	8
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019	13
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019	14
Tabel 3.1. Skala Penilaian.....	17
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja.....	19
Tabel 3.3.	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong (motivator) agar terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik sebagai media perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depan dan Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019 mengacu pada :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna adalah dalam rangka melaksanakan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban Kepada lembaga Legislatif dan publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019 adalah:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2019 kepada Bupati Natuna.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut.

3. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Natuna.

Dari tiga fungsi utama Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan tujuan** dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut tahun 2019.

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur Laut

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting, karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha

dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kecamatan Bunguran Timur Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 1 Desember 2006 di Tanjung . Setelah peresmian aktifitas kantor Camat Bunguran Timur Laut pindah ke kantor desa tanjung. Sejarah kecamatan Bunguran Timur Laut tidak dapat dipisahkan dan merupakan pemekaran dari kecamatan Bunguran Timur yang terletak dibagian utara Pulau Bunguran, yang terdiri dari 7 (tujuh) desa yaitu desa tanjung, ceruk, kelanga, pengadah, sebadai hulu, limau manis, dan selemam.

Tabel 1.1
Letak Geografis dan keadaan Umum

Uraian	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>
Batas Wilayah :	
a. Sebelah Utara	Kecamatan Bunguran Utara
b. Sebelah Selatan	Kecamatan Bunguran Timur
c. Sebelah Barat	Kecamatan Bunguran Tengah
d. Sebelah Timur	Laut Natuna
Luas Kecamatan	± 238.083 KM ²

Sumber : Data Kecamatan Bunguran Timur Laut Th 2019

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Nopember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Desa Tanjung	512	470	982	283
Desa Ceruk	504	487	991	333
Desa Kelanga	473	447	920	287
Desa Pengadah	284	273	557	163
Desa Sebadai Hulu	199	191	390	130
Desa Limau Manis	393	397	790	219
Desa Selemam	236	197	433	136
JUMLAH	2601	2462	5.063	1.551

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019

Permasalahan yang dihadapi kecamatan Bunguran Timur Laut dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan (kesempatan kerja)
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian
- c. Penangkapan Ikan masih menggunakan peralatan tradisional
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana jasa komunikasi
- e. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan
- f. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut.

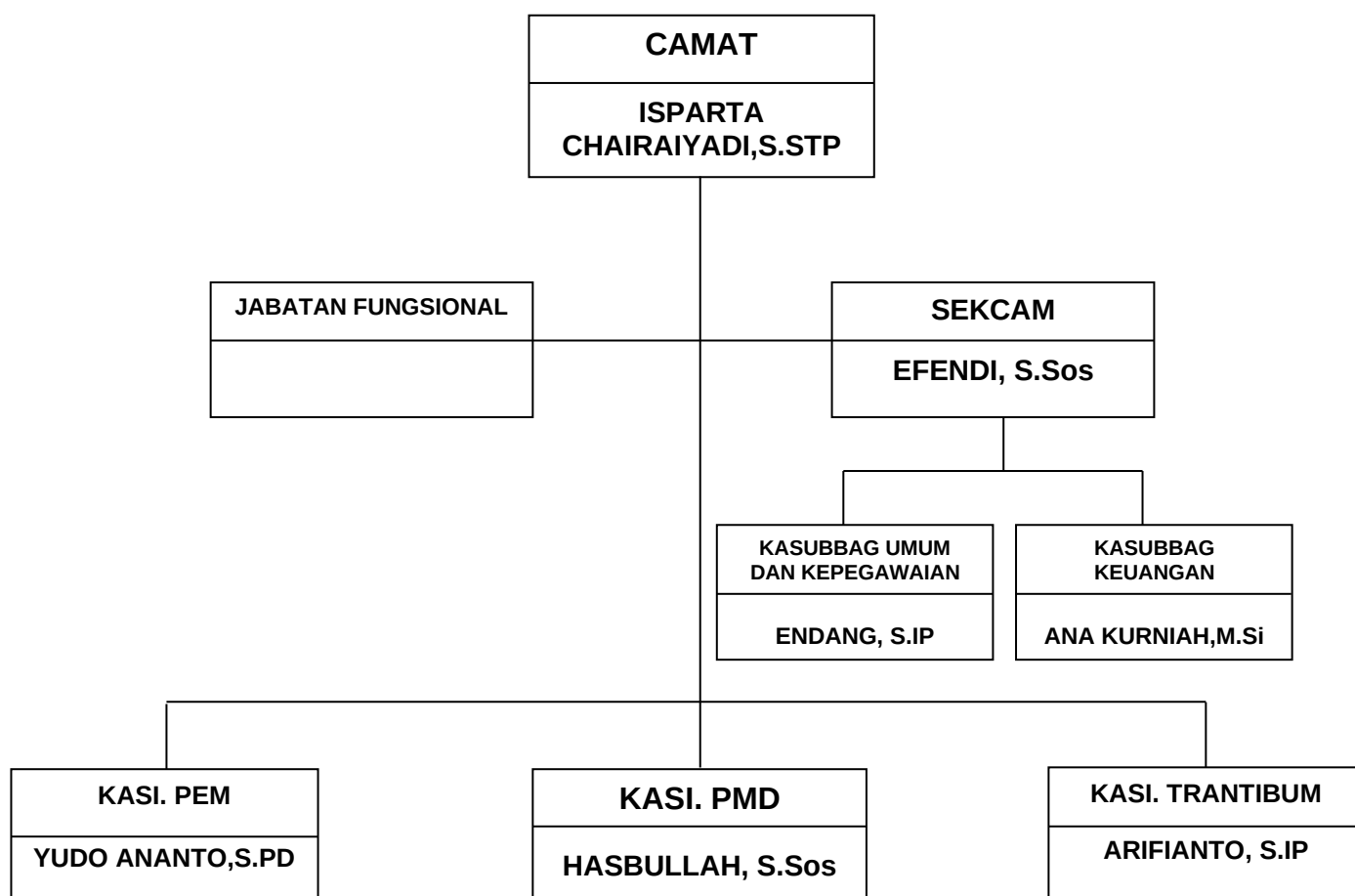
1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun susunan organisasi Kantor Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 1.3

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA**



Sumber : Data Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019

Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja mencakup sumber daya manusia dan modal atau aset.

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut berjumlah 33 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 15 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 18 (dua puluh satu) Pegawai Tidak Tetap (Honorar).

Adapun Jumlah Pegawai Kecamatan Bunguran Timur Laut berdasarkan Golongan. Jabatan/Eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data PNS dan PTT Kecamatan Bunguran Timur Laut

No	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Gol IV	Gol III	Gol II	PTT	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Camat	1 org	-	-	-	-	-	-	-	1 org
Sekcam	-	1 org	-	-	-	-	-	-	1 org
Kasi	-	-	3 org	-	-	-	-	-	3 org
Kasubbag	-	-	-	2 org	-	-	-	-	2 org
Staf PNS	-	-	-	-	-	2 org	6 org	-	8 org
Staf PTT	-	-	-	-	-	-	-	18 org	18 org
Jumlah	1 org	1 org	3 org	2 org	-	2 org	6 org	18 org	33 org

Sumber : Data Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur Laut
- 1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1. Rencana Stratesgi Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2016-2021
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019
- 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oraganisasi dan realisasi anggaran.

- 3.1. Pengukuran Kinerja
- 3.2. Analisis Kinerja
- 3.3. Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran -

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakneses*), Peluang (*opportunities*) dan tantangan / Kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi Kabupaten Natuna :

***“ Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka
Keimanan Dan Budaya Tempatan ”***

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sebagai suatu lembaga Pelayanan yang berkewajiban untuk menyusun Rencana Pelayanan dengan mempertimbangan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijakan dalam pelayanan untuk masa yang akan datang.

Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021 maka Kecamatan Bunguran Timur Laut mendukung misi ke 6 (enam) yaitu ***"Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat"***. Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki peranan

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Rumusan Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019 yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bunguran Timur Laut”***.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam periode pembangunan 2019, yaitu :

- 1 Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
- 2 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Bunguran Timur Laut
- 3 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah di Kecamatan Bunguran Timur Laut

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur Laut merupakan ukuran

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diemban.

Kecamatan Bunguran Timur Laut telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur Laut
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bunguran Timur Laut	1. Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.15	IKM

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Timur Laut telah menetapkan 10 program prioritas dijabarkan dalam 27 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.661.373.161,00**.

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat Bunguran Timur Laut menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Secara ringkas Perjanjian Kinerja tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 yang mendukung kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat pedesaan	1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 2. Pembinaan desa 3. Evaluasi perkembangan desa
			2. Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	1. Peningkatan operasional teknis perangkat daerah 2. Sosialisasi administrasi pertanahan
			3. Program administrasi perkantoran	1. Koordinasi dalam daerah 2. Koordinasi luar daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran . Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna .

Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut yang telah dicapai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* dengan realisasi kinerja Aktual Tahun 2019 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing OPD, data kepustakaan yang diperlukan kemudian

diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1.
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna untuk tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut tahun 2016–2021.

3.2. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja.

Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - b. Pembinaan Desa
 - c. Evaluasi perkembangan desa
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - j. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/ teknis Perkantoran
 - k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
 - d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
 5. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
 - a. Peningkatan operasional teknis perangkat daerah
 - b. Sosialisasi Pertanahan
 6. Program Pengembangan data / informasi
 - a. Penyusunan profil
 7. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 8. Program pembinaan Keagamaan
 - a. Penyelenggaraan MTQ/STQ
 - b. Pembinaan LPTQ
 9. Program penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Pembinaan Pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Tujuan

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Sasaran

- Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Bunguran Timur Laut.
- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah di Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2019.

Misi 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	3,15	3,18	100,95 %

Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat dengan target 3,15 dengan Realisasi mencapai 3,18 dengan persentase capaian **100,95 %** (persen) ,

dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah.

Hasil IKM diukur dari suvey yang dilakukan pada tahun 2019 dengan jumlah responden sebanyak 39 orang yang menerima pelayanan di kantor Kecamatan yang mencakup 9 unsur pelayanan yang menjadi tolak ukur. Adapun hasil survey per unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Unsur SKM	NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3,54
2.	Prosedur Pelayanan	3,67
3.	Waktu Pelayanan	3,51
4.	Biaya	3,97
5.	Produk Pelayanan	3,62
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,35
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3,44
8.	Sarana dan Prasarana	3,33
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3,74
	NRR Tertimbang	3,58
	Nilai IKM	78,55 (Baik)

Dari 9 Unsur pelayanan yang ada, terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki NRR SKM yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan yang unsur waktu pelayanan, produk layanan dan kompetensi petugas dikarenakan mendapat nilai terendah dari unsur yang lain. Unsur – unsur tersebut adalah :

1. Sarana dan prasarana : 3,33
2. Kompetensi Petugas pelayanan : 3,35

3. Perilaku Petugas Pelayanan : 3,44

Untuk meningkatkan tiga unsur pelayanan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut menindaklanjuti hasil survey dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang ada.
- c. Mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah, cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas.
- e. Meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodic, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menerapkan *reward* dan *punishment*.
- f. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan melalui pelatihan antara lain *character building*.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

	pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah -Peningkatan operasional teknis perangkat daerah - Sosialisasi administrasi pertanahan		Rp. 249,882,000.00 Rp. 8.400.000,00	248,372,500.00 8.160.000,00	99,40% 97,14%	100 100
	Jumlah		Rp. 588,074,000,00	Rp. 580,096,458	98,64 %	100 %

Penyerapan Anggaran dalam Menunjang Indikator Kinerja Utama dari Anggaran 588,074,000 Terealisasi sekitar 580,096,458 dengan persentase 95,30 %. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi dalam meningkatkan Pelayanan di Kecamatan dengan cara Penyerapan Anggaran yang tepat sasaran.

Pada tahun 2019 dialokasi dana Belanja Langsung sebesar Rp1.661.373.161,- dengan penyerapan anggaran sebesar 97,25%. dari dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian IKU sebesar Rp588.074.000,00 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.977.542,00.

44,35 persen. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian IKU Kec...belum efisien dikarenakan banyak kegiatan untuk menunjang pelayanan publik seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur serta pelayanan administrasi.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2019 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Bunguran Timur Laut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2019 dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Camat Bunguran Timur Laut kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna dimasa mendatang.

Bunguran Timur Laut, 9 Januari 2020

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT



ISPARTA CHAIRAIYADI, S.STP
NIP. 19840512 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

Jalan Imam Qolun No. Setuik – Tanjung
Email : bungtila_lautbtl@gmail.com

T A N J U N G

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA/LAPORAN KINERJA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
TAHUN ANGGARAN 2019**

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun Anggaran 2018 memerlukan keseimbangan Realisasi Kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Bunguran Timur Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/LaporanKinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA/LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :
1. Menghimpun dan mendata Capaian Kinerja Perangkat Daerah ;
 2. Menghimpun dan Mendata Aset Kecamatan;
 3. Menghimpun dan Mendata Realisasi Kegiatan Kecamatan;
 4. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada Tanggal 05 November 2019

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,



ISPARTA CHAIRAIYADI, S.STP

Penata Tk. I

NIP.19840512 200312 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Natuna Cq. BP3D Kab. Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Natuna di Ranai;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Natuna di Ranai;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT
NOMOR : 35TAHUN 2019
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2019

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA/LAPORAN KINERJAKECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ISPARTA CHAIRAIYADI,S.STP	CAMAT	PEMBINA/PENGARAH	
2	EFENDI,S,Sos	SEKCAM	KETUA	
3	ANA KURNIAH,Msi	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS	
4	KHAIDIR	STAF/BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA	
5	AZUAR	STAF KANTOR CAMAT	ANGGOTA	
6	ZARIN	STAF KANTOR CAMAT	ANGGOTA	
7	MUHAMAD ZAKI	STAF KANTOR CAMAT	ANGGOTA	

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,



ISPARTA CHAIRAIYADI,S.STP

Penata Tk. I

NIP.19840512 200312 1 002

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	NOMOR SOP	: 800/ 350 /KBTL /XI/2019
	TGL. PEMBUATAN	: 13 November 2019
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 01 Desember 2019
	DISAHKAN OLEH	CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,  <u>ISPARTA CHAIRAIYADLS.STP</u> NIP 19840512 200312 1 002
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT (LKj)		
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut; 5. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.		1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) 2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan dan menganalisis data laporan realisasi program dan kegiatan OPD satu tahun
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut SOP Penetapan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Laut		1. Komputer/Laptop /printer dan peralatan pendukung lainnya 2. Dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut 3. Format penyusunan Lkj 4. Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan 5. Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Bunguran Timur Laut
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika penyusunan LKj OPD tidak sesuai SOP maka akan mempengaruhi pelaksanaan kinerja OPD		Disimpan sebagai data elektronik dan manual Rumusan Program, Kegiatan dan Target untuk satu tahun Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja.

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Buku			Ket
		Sekcam	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Seksi	Camat	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyusun LKj						Disposisi Surat	5 menit	Disposisi Surat	
2	Membuat format pengumpulan data pendukung rencana LKj dari masing-masing Seksi dan Sekretariat						Format penyusunan dokumen LKj OPD	1 jam	Format penyusunan dokumen LKj OPD	
3	Menyampaikan format pengumpulan data pendukung LKj dari masing-masing Seksi dan Sekretariat						Format penyusunan dokumen LKj OPD	30 menit	Format penyusunan dokumen LKj OPD	
4	Menghimpun format data dan pendukung LKj dari masing-masing Seksi dan Sekretariat						Format penyusunan dokumen LKj	1 jam	Format penyusunan dokumen LKj	
5	Menganalisa data dan pendukung rencana kerja (renja) yang telah terkumpul						Penyusunan Dokumen LKj	2 jam	Penyusunan Dokumen LKj	
6	Membuat dokumen LKj						Draf LKjIP	1 hari	Draf LKj	
7	Mengoreksi dokumen LKj Kecamatan Bunguran						Dokumen LKjIP	2 jam	Dokumen LKj	
8	Menyampaikan dokumen LKj kepada Camat untuk persetujuan						Dokumen LKjIP	3 jam	Dokumen LKj	
9	Penandatanganan Dokumen LKj						Dokumen LKjIP	10 menit	Dokumen LKj	
10	Pembuatan Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran						Konsep Surat Pengantar	20 menit	Surat Pengantar	
11	Penggandaan dokumen LKj						Dokumen LKj	1 hari	Dokumen LKj	
12	Pengiriman dokumen LKj ke Bagian Organisasi Setda Kab. Natuna dan Pengarsipan						Dokumen LKj	30 menit	Dokumen LKj	

